MAHKAMAH AGUNG

- KAJIDAH HUKUM** : Bahwa untuk dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, putusan Pengadilan Niaga harus memenuhi syarat Pasal 82 Undang-Undang Kepailitan, yang menentukan bahwa ketetapan-ketetapan Hakim dalam hal-hal yang mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit, Pengadilan memutus dalam tingkat penghabisan. Dengan demikian terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Niaga dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun Peninjauan Kembali.
- NOMOR REGISTER** : 016 PK/N/2002
- TANGGAL PUTUSAN** : 03 Juli 2002
- MAJELIS** : – Bagir Manan, SH.
– H. Toton Suprpto, SH.
– Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH.
- KLASIFIKASI** : Tentang Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit
- DUDUK PERKARA** : 1. Bahwa Pemohon adalah Kurator PT. Gemilang yang diangkat berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 05/PKPU/2000/PN.Niaga. Jkt.Pst, jo. No.17/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt. Pst.
2. Bahwa dalam rapat-rapat para kreditur PT. Gemilang (dalam Pailit) yang diadakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam rangka verifikasi/pencocokan piutang sesuai Undang-Undang Kepailitan, maka telah berhasil dibuat Daftar Piutang para Kreditur PT. Gemilang (dalam Pailit), yang diakui tanggal 2 November 2000 yang ditandatangani oleh semua kreditur, termasuk Termohon dan Pemohon serta Hakim Pengawas.
3. Bahwa sesuai surat Termohon kepada Kurator tanggal 12 Oktober 2000, maka Termohon menjelaskan bahwa piutangnya terhadap PT. Gemilang (dalam Pailit) dijamin dengan obyek jaminan/Hak Tanggungan.
4. Bahwa dengan selesainya pencocokan piutang dengan ditandai penandatanganan Daftar Piutang

para Kreditur PT. Gemilang (dalam Pailit) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) U1JK yang berbunyi : “Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 56 A, Kreditur pemegang Hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 ayat (1)” Maka Termohon selaku Pemegang hak tanggungan, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan harus melaksanakan hak istimewanya tersebut.

5. Bahwa dalam pelaksanaannya, karena Termohon tidak menggunakan sesuai ketentuan pasal 57 ayat (1) UUK, maka Pemohon demi hukum harus mengambil alih hak tersebut diatas.
6. Bahwa nyatanya Termohon dengan suratnya tertanggal 21 Mei 2001 dan 18 Juni 2001 yang ditujukan kepada Pemohon, jelas-jelas menolak pekerjaan Pemohon guna melakukan penjualan dimuka umum atas barang-barang jaminan diatas, apalagi menyerahkan dokumen asli yang dikaitkan dengan barang-barang jaminan tersebut.

AMAR PUTUSAN PENGADILAN NIAGA :

Dalam eksepsi :

- Tolak eksepsi dari Termohon;

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi dari Pemohon;

Dalam Pokok Perkara :

- Kabul Permohonan Pemohon;
- Menyatakan Termohon tidak menggunakan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (1) Perpu No.1/1998.

AMAR PUTUSAN KASASI :

Menolak Kasasi BPPN

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI :

1. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah keliru dengan menerima pendaftaran perkara yang sama.
2. Bahwa Surat Pernyataan Bersama yang telah dibuat oleh LILIANA UTOJO GUMILANG, BACHTIAR GUNADI BRATADIHARJA, tidak ada relevansinya dan hubungannya dengan menyerahkan sertifikat dan hak tanggungan atas sertifikat.
3. Bahwa Surat Pernyataan Bersama tersebut di atas adalah tidak pernah dijadikan alat bukti di dalam persidangan, akan tetapi Majelis Hakim memasukkannya dalam pertimbangan hukum
4. Judex Factie pada putusan No.05/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No.17/Pailit/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 7 Maret 2002 tidak mempertimbangkan tentang masalah ne bis in idem.
5. Judex Factie pada putusan No. 05/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 17/PaiLit/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 7 Maret 2002 tidak mempertimbangkan tentang batasan kewenangan Kurator.

AMAR PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI :

Tolak Peninjauan Kembali (PK) BPPN.

PERTIMBANGAN HUKUM PK :

Bahwa untuk dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, putusan Pengadilan Niaga harus memenuhi syarat Pasal 82 Undang-Undang Kepailitan, yang menentukan bahwa ketetapan-ketetapan Hakim dalam hal-hal yang mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit, Pengadilan memutus dalam tingkat penghabisan. Dengan demikian terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Niaga dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Penyusun Kaedah Hukum

ttd.

Didik Purwanto, SH.

Mengetahui :

Kepala Seksi Kaedah Hukum
Direktorat Perdata Niaga

ttd.

Saar Sudjana, SH.

P U T U S A N

Nomor : 016 PK/N/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara niaga dalam permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dan :

BADAN PENYEKUTAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), berkedudukan di Wisma Danamon Aetna Life Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 45 – 46 Jakarta 12930, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. IRWAN RASJID, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Irwan Rasjid & Associates, beralamat di Executive Golf Mansion Kaveling 20, Jalan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2002, Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Termohon Penyerahan Barang Untuk Dijual;

melawan

TAFRIZAL HASAN GE WANG, S.H., bertindak selaku Kurator PT. GEMILANG (dalam pailit), beralamat Kantor Hukum Tafrizal Hasan Gewang & Rekan di Gedung Sentra Salemba Mas Blok U, Jalan Salemba Raya Nomor 34 – 36 Jakarta Pusat, Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Kurator (Pemohon Penyerahan Barang Untuk Dijual);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi / Termohon Penyerahan Barang untuk dijual telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 April 2002 Nomor : 010 K/N/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Kurator/Pemohon Penyerahan Barang untuk dijual dengan posita perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Kurator PT. GEMILANG yang diangkat berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 05/PKPU/2000/

PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor : 17/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst., tanggal 13 Juli 2000 (Bukti P-1) dan semula permohonan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdaftar Nomor 372/Pdt.G/2001/PN.Niaga. Jkt. Sel., namun dalam putusan tanggal 13 November 2001, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam salah satu amar putusannya menyebutkan : “Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut” (Bukti P-2);

2. Bahwa karenanya memenuhi putusan tersebut, pemohon mengajukan permohonan kembali kepada Termohon dan ditujukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna memeriksa dan menyidangkan perkara aquo;
3. Bahwa dalam rapat-rapat para Kreditor PT. GEMILANG (Dalam Pailit) yang diadakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam rangka verifikasi/pencocokan piutang sesuai Undang-Undang Kepailitan, maka telah berhasil dibuat Daftar Piutang para Kreditor PT. GEMILANG (Dalam Pailit) yang diakui tanggal 2 November 2000 yang ditandatangani oleh semua Kreditor, termasuk Termohon dan Pemohon serta Hakim Pengawas, Bapak Victor Hutabarat, S.H. (Bukti P-3);
4. Bahwa sesuai surat Termohon kepada Kurator tanggal 12 Oktober 2000, maka Termohon menjelaskan bahwa piutangnya terhadap PT. GEMILANG (Dalam Pailit) dijamin dengan obyek jaminan/hak tanggungan atas:
 - 4.1. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3134/Bangka seluas 1.797 M² atas nama HEDIYATI GUNADI BRATADIHARDJA, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka dengan Sertifikat Hak Tanggungan masing-masing:
 - Nomor 4293/1996 tanggal 16 Oktober 1996 jo. Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor 400/Mp.Prap/1996 tanggal 27 September 1996 yang dibuat dihadapan Drs. HENSON, SH., selaku PPAT di Jakarta;
 - Nomor 815/1997 tanggal 3 April 1997 jo. Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor 7/Mp.Prap/1997 tanggal 24 Maret 1997 yang dibuat dihadapan IRAWATI MARZUKI ARIFIN, SH., selaku PPAT di Jakarta;
 - 4.2. 7 (tujuh) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat-sertifikat Hak Milik :
 - Nomor : 74/Jabon Mekar;
 - Nomor : 88/Jabon Mekar;
 - Nomor : 89/Jabon Mekar;
 - Nomor : 90/Jabon Mekar;
 - Nomor : 91/Jabon Mekar;

— Nomor : 92/Jabon Mekar;

— Nomor : 93/Jabon Mekar;

tertulis atas nama LIMA UTOJO GUMILANG, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung, Kelurahan Jabon Mekar dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 359/1996 jo. Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1876/72/Parung/1996 tanggal 28 Juni 1996 yang dibuat dihadapan Ny. AGUSTY RIDWAN, SH., selaku PPAT di Bogor;

4.3. 2 (dua) bidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 69/Bangka dan Nomor : 1090/Bangka tertulis atas nama Ny. LILIANA, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 789/1996 tanggal 25 Juni 1996 jo. Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 218/Mp-Prapatan/1996 tanggal 4 Juni 1996 yang dibuat dihadapan MUHANI SALIM, SH., selaku PPAT di Jakarta (Bukti P-4);

5. Bahwa dengan selesainya pencocokan piutang dengan ditanda penanda tangan Daftar Piutang para Kreditur PT. GEMILANG (Dalam Pailit) yang diakui (vide Bukti P-3) maka sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, yang berbunyi : “Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56 A, kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1)”;

Maka Termohon selaku pemegang hak tanggungan, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan harus melaksanakan hak istimewanya tersebut;

6. Bahwa dalam pelaksanaannya, karena Termohon tidak menggunakan hak sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, maka Pemohon selaku Kurator demi hukum harus mengambil alih hak tersebut diatas;

7. Bahwa nyatanya, Termohon dengan suratnya tertanggal 21 Mei 2001 dan 18 Juni 2001 (Bukti P-5) dan Bukti (P-6) yang ditujukan kepada Pemohon, jelas-jelas menolak pekerjaan Pemohon guna melakukan penjualan dimuka umum atas barang-barang jaminan diatas, apalagi menyerahkan dokumen-dokumen asli yang dikaitkan dengan barang-barang jaminan tersebut;

PROVISI

8. Bahwa karena dalam kasus a quo, terjadi perbedaan-perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon mengenai Undang-Undang Kepailitan, khususnya mengenai ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi : “Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Kurator harus menuntut diteruskannya barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut”;

Maka dalam rangka penegakan dan tertib hukum, Pemohon mohon Majelis Hakim untuk mengeluarkan putusan provisional yang memerintahkan kepada Termohon untuk tidak melakukan eksekusi dan/atau penjualan maupun tindakan-tindakan hukum lain yang bertujuan mengalihkan barang jaminan tersebut dalam angka 3 diatas;

Maka berdasarkan uraian diatas, kiranya Majelis Hakim sependapat dengan kami dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- “Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon”;
- “Menghukum Termohon untuk tidak melakukan eksekusi dan / atau penjualan maupun tindakan-tindakan hukum lain yang bertujuan mengalihkan barang-barang jaminan berupa :

 1. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 3134/Bangka seluas 1.797 M² atas nama HEDIYATI GUNADI BRATADIHARDJÁ, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka dengan Sertifikat Hak Tanggungan masing-masing :
 - Nomor : 4293/1996 tanggal 16 Oktober 1996 jo. Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor 400/Mp.Prap/1996 tanggal 27 September 1996 yang dibuat dihadapan Drs. HENSON, S.H., selaku PPAT di Jakarta;
 - Nomor : 815/1997 jo. Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 7/ Mp. Prap/1997 tanggal 24 Maret 1997 yang dibuat dihadapan IRAWATI MARZUKI ARIFIN, S.H., selaku PPAT di Jakarta;
 2. 7 (tujuh) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat-sertifikat Hak Milik :
 - Nomor : 74/Jabon Mekar;
 - Nomor : 88/Jabon Mekar;
 - Nomor : 89/Jabon Mekar;
 - Nomor : 90/Jabon Mekar;
 - Nomor : 91/Jabon Mekar;
 - Nomor : 92/Jabon Mekar;
 - Nomor : 93/Jabon Mekar;

tertulis atas nama LIMA UTOJO GUMILANG, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung, Kelurahan Jabon Mekar dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 359/1996 jo. Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 1876/72/Parung/1996 tanggal 28 Juni 1996 yang dibuat dihadapan Ny. AGUSTY RIDWAN, S.H., selaku PPAT di Bogor;

3. 2 (dua) bidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 69/Bangka dan Nomor : 1090/Bangka tertulis atas nama Ny. LILIANA, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 789/1996 tanggal 25 Juni 1996 jo. Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 218/Mp.Prapatan/1996 tanggal 4 Juni 1996 yang dibuat dihadapan MUHANI SALIM, S.H., selaku PPAT di Jakarta;

DALAM POKOK PERKARA

- “Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon”;
- “Menyatakan Termohon bersalah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan”;
- Menghukum Termohon untuk menyerahkan barang agunan berikut bukti kepemilikannya, yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 3134/Bangka seluas 1.797 M² atas nama HEDIYATI GUNADI BRATADIHARDJA, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 74/Jabon Mekar, Nomor : 88/Jabon Mekar, Nomor : 89/Jabon Mekar, Nomor : 90/Jabon Mekar, Nomor : 91/Jabon Mekar, Nomor : 92 Jabon Mekar, Nomor : 93/Jabon Mekar, tertulis atas nama LIMA UTOYO GUMILANG, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung, Kelurahan Jabon Mekar;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 69/Bangka dan Nomor : 1090/Bangka tertulis atas nama Ny. LILIANA, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka;kepada Pemohon guna dilakukan penjualan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan”;
- “Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara”;
- “Dalam peradilan yang baik mohon putusan ex aequo et bono”;

Bahwa terhadap permohonan Penyerahan Barang Untuk Dijual tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

Permohonan yang diajukan Pemohon telah pernah diperkarakan atau diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan putusan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde zaak);

1. Bahwa dalam perkara ini Pemohon selaku Kurator PT. GEMILANG (pailit) pernah atau mengajukan permasalahan yang sama berkaitan dengan asset atau harta kekayaan milik para penjamin dan pihak ketiga apakah masuk dalam boedel pailit atau diluar boedel pailit untuk diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 05/PKPU/2000.PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor : 17/PAILIT/2000.PN.NIAGA.JKT.PST.;

Majelis Hakim Pengadilan dalam perkara Nomor tanggal 20 Desember 2000 Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 05/PKPU/2000. PN.NIAGA.JKT.PST. telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Menyatakan benda yang dijaminakan Lima Utojo Gumilang Sebagai penjamin debitur pailit/PT.Gemilang dan Ny. Liliana sebagai pihak ketiga tidak termasuk harta/boedel pailit PT. Gemilang (Bukti T-1); Berdasarkan isi putusan ini secara hukum kurator tidak berwenang melakukan pengurusan atau pemberesan terhadap asset diluar boedel pailit yang berada di BPPN. Dengan demikian terhadap asset-asset diluar boedel pailit tidak tunduk pada ketentuan Undang-Undang Kepailitan;

2. Selanjutnya atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat in casu perkara Nomor : 05/PKPU/2000 PN.NIAGA.JKT.PST. Jo. Nomor : 17/PAILIT/2000.PN.NIAGA.JKT.PST., Pemohon mengajukan upaya Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI.

Dalam putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 Juli 2001 dalam register perkara Nomor : 016 PK/N/2001 telah memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dan TAFRIZAL HASAN GE WANG, S.H., selaku Kurator PT. GEMILANG tersebut tidak dapat diterima (Bukti T-2);

3. Bahwa atas putusan-putusan sebagaimana tersebut diatas in casu dalam perkara Nomor : 05/PKPU/2000.PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 17/

PAILIT/2000.PN.NIAGA.JKT.PST. secara hukum atas obyek/barang sengketa dalam perkara ini dinilai telah diputus baik ditingkat pertama pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bukti T-1) maupun ditingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bukti T-2) dan atas putusan-putusan tersebut merupakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*), sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut secara hukum Pemohon tidak berhak atau berwenang mengajukan kembali terhadap perkara yang sama di tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, oleh karena itu atas permohonan Pemohon dalam perkara ini dinilai merupakan perkara yang telah "*ne bis in idem*";

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

4. Bahwa menunjuk ketentuan Pasal 280, Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Kepailitan dinyatakan :
 - (1). Permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Bab Pertama dan Bab Kedua, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada dilingkungan Peradilan Umum;
 - (2). Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memeriksa dan memutus permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 282 :

- (1). Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama dengan Hakim Majelis;
- (2). Dalam hal yang menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2), Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal;

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut diatas bahwa Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutuskan atas perkara-perkara sebagai berikut :

- a. Permohonan pernyataan Pailit;
- b. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- c. Perkara lain di bidang Perniagaan;

Sehubungan dengan permohonan Pemohon perihal penyerahan barang untuk dijual sesuai ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Kepailitan, Termohon menilai permohonan tersebut tidak termasuk dalam lingkup perkara di bidang Kepailitan sehingga demi hukum Pengadilan Niaga dinilai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh pemohon selaku Kurator PT. GEMTLANG (Pailit) dalam hal Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan perkara aquo Termohon dan menilai Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa atas permohonan ini, Pemohon dinilai telah mencampurkan pengertian antara permohonan dan gugatan atau tuntutan. Dimana pada halaman pertama Pemohon mengajukan atas perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon mengenai ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, sedangkan pada halaman 5 dalam pokok perkara menuntut :

- Menyatakan Termohon bersalah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan;
- Menghukum Termohon menyerahkan barang agunan berikut bukti kepemilikan;

Dalam perkara yang disebut permohonan secara hukum tidak ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Sebaliknya dalam perkara gugatan atau tuntutan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan atau diputus oleh Pengadilan atas segala kerancuan dalam permohonan ini dinilai tidak jelas dan kabur;

5. Bahwa Termohon sangat keberatan atas dalil-dalil dan Pemohon yang menyatakan dasar hukum diajukannya permohonan dalam perkara ini didasarkan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor : 372/Pdt.G/2001.PN.Jkt.Sel. tanggal 13 November 2001, yang salah satu amarnya menyebutkan :

“Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut” (Bukti P-1);

Bahwa atas adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor : 372/Pdt.G/2001.PN.Jkt.Sd., sebenarnya secara hukum Pemohon sudah tidak berwenang lagi mengajukan kembali segala tuntutan hukum berkaitan dengan perkara a quo terhadap Termohon, baik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan atas permasalahan dalam perkara ini telah ada putusan-

putusan, khususnya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, perlu kiranya Majelis Hakim mencermati prinsip-prinsip dalam hukum acara yang berlaku secara umum dan khusus baik acara perdata maupun acara di bidang kepailitan.

Pengajuan atas permasalahan yang sama dengan membuat dalil-dalil yang mengada-ada justru menunjukkan bukti adanya itikad baik dan Pemohon, yang dipandang telah melakukan tindakan hukum atau upaya-upaya hukum yang sangat bertentangan dengan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juli 2001 perkara Nomor : 016 PK/N/2001 dan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2000 perkara Nomor : 05/PKPU/2000 PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor : 17/Pailit/2000. PN. Niaga.Jkt.Pst. ; Secara hukum putusan-putusan tersebut dinilai telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Pemohon selaku Kurator tidak berwenang melakukan penuntutan atas harta (barang) di luar Boedel Pailit;

7. Menunjuk Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa : "Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit". Dan ketentuan Pasal tersebut secara jelas dan tegas bahwa Kurator hanya berwenang melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta milik dan Debitur Pailit, diluar itu Kurator tidak berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena dalam perkara ini diketahui debitur pailit adalah : PT. GEMILANG, maka secara hukum Kurator hanya berwenang melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan milik PT. Gemilang selaku debitur pailit. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan serta adanya putusan-putusan sebagaimana Bukti T-1 dan Bukti T-2 menjadi dasar hukum dan Termohon untuk menilai Pemohon selaku Kurator PT. Gemilang (Pailit) tidak berwenang melakukan penuntutan atas harta/barang di luar boedel pailit;

bahwa terhadap permohonan Penyerahan Barang Untuk Dijual (PBUD) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 7 Maret 2002 Nomor: 05/PKPU/2000/PN. NIAGA. JKT.PST. jo. Nomor : 17/PAILIT/2000/PN.NIAGA. JKT. PST., dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dan Termohon;

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi dan Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Termohon tidak mempergunakan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;
- Menghukum Termohon untuk menyerahkan barang agunan berikut bukti kepemilikannya berupa :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 3134/Bangka seluas 1.797 M² atas nama HEDIYATI GUNADI BRATADIHARDJA, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 74/Jabon Mekar, Nomor : 88/Jabon Mekar, Nomor : 89/Jabon Mekar, Nomor : 90/Jabon Mekar, Nomor : 91/Jabon Mekar, Nomor : 92 /Jabon Mekar, Nomor : 93/Jabon Mekar, tertulis atas nama LIMA UTOJO GUMILANG, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung, Kelurahan Jabon Mekar;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 69/Bangka dan Nomor : 1090/Bangka tertulis atas nama Ny. LILIANA, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka;

kepada Pemohon guna dilakukan penjualan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tanpa mengurangi hak Termohon untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut;

- Membebaskan Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 April 2002 Nomor : 010 K/N/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5 .000.000,-

Menimbang, bahwa sesudah putusan tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung April 2002 Nomor : 010 K/N/2002 diberitahukan Termohon Penyerahan Barang Untuk Dijual berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2002 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 24 Mei 2002 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 24 Mei 2002 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 27 Mei 2002, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Juni 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 2 288 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah keliru dengan menerima pendaftaran perkara yang sama dengan nomor pendaftaran yang sama.
 - A. Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tetap menerima pendaftaran perkara a quo, dimana perkara a quo telah diputus sebagaimana putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 05/PKPU/2000 PN. Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 17/Pailit/2000.PN.Niaga.Jkt.Pst. serta putusan Peninjauan Kembali Nomor : 016 PK/N/2001 yang putusannya menyatakan bahwa :

“Permohonan Peninjauan Kembali dan TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH., selaku Kurator PT. GEMILANG tersebut tidak dapat diterima” dan bahkan Termohon Peninjauan Kembali pun telah pula mengajukan permohonan yang sama melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor : 372/Pdt.G/2001/PN.Jal.Sel.;
 - B. Bahwa putusan-putusan perkara yang sama yang telah diajukan oleh termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :
 1. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 05/PKPU/2000.PN.Negeri.Jkt.Pst. jo. Nomor : 17/Pailit/2000;

Memutuskan :

“Menyatakan benda yang dijaminkan Lima Utojo sebagai Penjamin Debitur Pailit/PT. Gemilang dan sebagai pihak ketiga tidak termasuk harta/boedel Gemilang;

2. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 016 PK/N/2001;

Mengadili :

“Menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dan TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH., selaku Kurator PT. Gemilang tersebut tidak dapat diterima;

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 372/Pdt.G/2001/PN. Jak. Sel.;

Mengadili :

(1) Menerima Eksepsi Tergugat;

(2) Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

(3) Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa jelaslah dari seluruh putusan yang berkaitan dengan perkara aquo telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih menerima perkara tentang masalah yang sama dengan nomor perkara yang sama yaitu Nomor : 05/PKPU/2000/PN. Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor : 17/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang telah memberikan putusan yang berlainan dan putusan-putusan yang terdahulu yang merupakan suatu masalah / perkara yang sama dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan suatu kekeliruan atas penerimaan suatu perkara yang telah pernah diputus dan terhadap perkara yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- C. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam memberikan pertimbangan sebagaimana pertimbangan hukum dan putusan Nomor : 010 K/N/2002 pada halaman 23 yang menyatakan bahwa perkara a quo adalah merupakan putusan dalam rangka pemberesan harta pailit yang bersifat eksekutorial bukan putusan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

Bahwa Judex facti telah keliru dimana sebelumnya telah ada 3 putusan terhadap perkara yang sama yaitu :

1. Perkara Nomor : 05/PKPU/2000.PN.NIAGA. JKT.PST. jo.Nomor : 17/PAILIT/2000;

2. Perkara Nomor : 016 PK/N/2001;
3. Perkara Nomor : 372/Pdt.G/2001.PN.JAK. SEL.;

Yang semuanya jelas tentang hal yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga perkara tersebut seharusnya *ne bis in idem*;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan putusan *a quo* tidak dapat diajukan kasasi : dimana perkara yang sama sebelumnya telah diputus sebagaimana putusan :

1. Perkara Nomor : 05/PKPU/2000.PN.NIAGA. JKT.PST. jo. Nomor : 17/PAILIT/2000;
2. Perkara Nomor : 016 PK/N/2001;
3. Perkara Nomor : 372/Pdt.G/2001.PN.JAK. SEL.;

Sehingga tentunya *Judex Facti* harus lebih cermat dengan adanya pengajuan atau pendaftaran baru terhadap perkara yang sama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan putusan *a quo* tidak dapat diajukan kasasi adalah saling tumpang tindih dengan fakta yang ada dimana untuk perkara *a quo* telah ada putusan tetap sebelumnya;

- D. Bahwa *Judex facti* dalam memberikan pertimbangan dalam putusan Nomor : 010 K/N/2002 pada halaman 22 dan 23 :

“apakah atas putusan *a quo* dapat diajukan upaya hukum kasasi Pasal 8 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, dengan tegas mengatur bahwa upaya hukum kasasi hanya berlaku bagi putusan pernyataan pailit. Bahwa perkara *a quo* adalah merupakan putusan dalam rangka pemberesan harta pailit yang bersifat eksekutorial bukan putusan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 8”.

Bahwa seharusnya *Judex Facti* dalam putusannya juga membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor : 05/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor : 17/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 7 Maret 2002, karena putusan *Judex Facti* – Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah putusan dalam pokok perkara;

- II. Pertimbangan *Judex Facti* pada putusan Nomor : 05/PKPU/2000/PN.NIAGA. JKT.PST. Jo. Nomor : 17/PAILIT/2000/PN.NIAGA. JKT.PST., tertanggal 7 Maret 2002, pada halaman 17 menyebutkan :

“Bahwa Surat Pernyataan Bersama dan para penjamin / pemilik Hak Tanggungan (yang bukti-buktinya masih dipegang oleh Termohon hingga saat ini) yakni: LILIANA UTOJO GUMILANG, HEDIYATI UTOJO GUMILANG, BACHTIAR GUNADI BRATADIHARDJA yang menyatakan sepakat bahwa

sesuai perjanjian penjaminan mereka menyerahkan Sertifikat Hak Tanggungan atas tanah-tanah yang dijaminakan kepada Kurator (dalam hal ini adalah Pemohon) guna diselesaikan menurut ketentuan Kepailitan yang ada”;

Keberatannya adalah sebagai berikut :

“Bahwa Surat Pernyataan Bersama yang telah dibuat oleh LILIANA UTOJO GUMILANG, HEDIYATI UTOJO GUMILANG, BACHTIAR GUNADI BRATADIHARDJA, tidak ada relevansinya dan hubungannya dengan menyerahkan sertifikat dan hak tanggungan atas sertifikat tanah sebagaimana berikut :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3134/Bangka seluas 1.797 M² atas nama HEDIYATI GUNADI BRATADIHARDJA, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 74/Jabon Mekar, Nomor : 88/Jabon Mekar, Nomor : 89/Jabon Mekar, Nomor : 90/Jabon Mekar, Nomor : 91/Jabon Mekar, Nomor : 92/Jabon Mekar, tertulis atas nama LIMA UTOJO GUMILANG, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung, Kelurahan Jabon Mekar;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 69/Bangka dan Nomor : 1090/Bangka tertulis atas nama Ny. LILIANA, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka;

Bahwa Surat Pernyataan Bersama tersebut di atas adalah tidak pernah dijadikan alat bukti di dalam persidangan, akan tetapi Majelis Hakim memasukkannya dalam pertimbangan hukum;

Dan sertifikat sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan penjaminan kepada Bank Nusa dan Bank Umum Nasional yang berada dibawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atau dibawah pengawasan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga tentunya penyerahan tersebut hanyalah ditujukan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan bukan kepada Kurator TAFRIZAL HASAN GEWANG, S.H.;

- III. Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada putusan Nomor : 05/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo. Nomor : 17/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 7 Maret 2002 terhadap ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang keliru;

Bahwa sesuai dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 05/PKPU/2000.PN.NIAGA.JKT.PST. Jo. Nomor : 17/ PAILIT/ 2000.PN.NIAGA.JKT.PST. yang memutuskan bahwa :

“Menyatakan benda yang dijaminkan Lima Utojo Gumilang sebagai Penjamin Debitur Pailit/PT. Gemilang dan Ny. Liliana sebagai pihak ketiga, tidak termasuk harta / boedel pailit PT. Gemilang”;

Serta putusan Peninjauan Kembali Nomor : 016 PKIN/2001, yang putusannya menyatakan :

“Bahwa Peninjauan Kembali dan TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH., selaku Kurator PT. GEMILANG tersebut tidak dapat diterima”;

Sehingga jelaslah bahwa barang-barang jaminan berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 31134/Bangka seluas 1.797 M² atas nama HEDIYATI GUNADI BRATADIHARDJA, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 74/Jabon Mekar, Nomor : 88/Jabon Mekar, Nomor : 89/Jabon Mekar, Nomor : 90/Jabon Mekar, Nomor : 91/Jabon Mekar, Nomor : 92/Jabon Mekar, tertulis atas nama LIMA UTOJO GUMILANG, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung, Kelurahan Jabon Mekar;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 69/Bangka dan Nomor : 1090/Bangka tertulis atas nama Ny. LILIANA, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka;

Adalah tidak termasuk harta / boedel pailit PT. GEMILANG (sesuai dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 05/PKPU/2000.PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor : 17/Pailit/2000. PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Jadi pertimbangan *Judex Facti* terhadap ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan adalah keliru karena jelas dan tegas dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 05/PKPU/2000.PN.Niaga.Pst. Jo. Nomor : 17/Pailit/2000.PN.Niaga.Jkt.Pst.), dimana benda yang dijaminkan Lima Utojo Gumilang tidak termasuk harta / boedel pailit PT. Gemilang, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali keberatan untuk menyerahkan barang agunan berikut bukti kepemilikannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dalam perkara a quo;

IV. *Judex Facti* pada putusan Nomor : 05/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo. Nomor : 17/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 7 Maret 2002 tidak mempertimbangkan tentang masalah *ne bis in idem* :

1. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan tentang masalah *ne bis in idem* karena sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga

- pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 05/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor : 17/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst.) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa benda yang dijaminkan Lima Utojo Gumilang sebagai Penjamin Debitur Pailit / PT. GEMILANG dan Ny. LILIANA sebagai pihak ketiga, tidak termasuk harta/boedel pailit PT. GEMILANG. Sehingga berdasarkan isi putusan tersebut benda yang dijaminkan Lima Utojo Gumilang merupakan asset-asset diluar boedel pailit dan tidak tunduk pada ketentuan Undang-Undang Kepailitan;
2. Tentang putusan Nomor : 016/PK/N/2001, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dan Tafrizal Hasan Gewing, SH., selaku Kurator PT. Gemilang tersebut tidak dapat diterima;
 3. Bahwa jelaslah dalam putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentunya Pemohon tidak berhak atau berwenang mengajukan kembali terhadap perkara yang sama ditingkat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ne bis in idem;
- V. *Judex Facti* pada putusan Nomor : 05/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo. Nomor : 17/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 7 Maret 2002 tidak mempertimbangkan tentang batasan kewenangan Kurator :
1. Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 05/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo. Nomor : 17/PAILIT/2000/PN.NIAGA. JKT. PST., dimana menyatakan bahwa benda yang dijaminkan LIMA UTOJO GUMILANG sebagai Penjamin Debitur Pailit / PT. GEMILANG dan Ny. LILIANA sebagai pihak ketiga, tidak termasuk harta / boedel pailit adalah :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3134/Bangka seluas 1.797 M² atas nama HEDIYATI GUNADI BRATADIHARDJA, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 74/Jabon Mekar, Nomor : 88/Jabon Mekar, Nomor : 89/Jabon Mekar, Nomor : 90/Jabon Mekar, Nomor : 91/Jabon Mekar, Nomor : 92/Jabon Mekar, tertulis atas nama LIMA UTOJO GUMILANG, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung, Kelurahan Jabon Mekar;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 69/Bangka dan Nomor : 1090/Bangka tertulis atas nama Ny. LILIANA, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka;
 2. Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa : “Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pembersihan harta pailit”;

Dari ketentuan Pasal tersebut secara jelas bahwa Kurator hanya berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena dalam perkara ini diketahui debitur pailit adalah PT. GEMI LANG, maka secara hukum Kurator hanya berwenang melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan milik PT. Gemilang selaku debitur pailit. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 67 (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut jelaslah bahwa selaku Kurator PT. Gemilang (Pailit) tidak berwenang melakukan penuntutan atas harta / asset diluar boedel pailit. Sehingga jelaslah bahwa asset diluar harta / boedel pailit tidaklah menjadi wewenang pengurusan Kurator;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan-kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diberikan dalam rangka pengurusan atau pemberesan harta pailit dapat atau tidak diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

bahwa untuk dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, putusan Pengadilan Niaga harus memenuhi syarat Pasal 82 Undang-Undang Kepailitan. Pasal 82 tersebut menentukan, bahwa ketetapan-ketetapan Hakim dalam hal-hal yang mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit, Pengadilan memutus dalam tingkat penghabisan. Dengan demikian terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Niaga dalam rangka pengurusan atau pemberesan harta pailit, tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun Peninjauan Kembali;

bahwa secara berlebihan perlu pula dipertimbangkan, bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan ditentukan, bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan si Berhutang pada saat pernyataan pailit beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan;

Sedangkan barang yang berada diluar kepailitan sebagaimana yang secara limitatif disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Kepailitan. Sehingga dengan demikian barang-barang yang dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap Pemohon Peninjauan Kembali memang bukan barang-barang yang termasuk dalam kualifikasi Pasal 20 tersebut, dan oleh karenanya merupakan barang yang termasuk dalam kepailitan, dan dapat dituntut oleh Kurator, in casu Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan-kembali, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) tersebut tidak berasalan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Penyerahan Barang Untuk Dijual dipihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, serta Undang-Undang lain yang bersangkutan,

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali **BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN)** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Penyerahan Barang Untuk Dijual untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: RABU, tanggal 3 JULI 2002 dengan **BAGIR MANAN** Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **H. TON SUPRAPTO, S.H.**, dan **PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, S.H.**, para Ketua Muda Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh **H. TON SUPRAPTO, S.H.**, dan **PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, S.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta **RAHMI MULYATI, S.H.**, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd.

ttd.

H. TON SUPRAPTO, S.H.

BAGIR MANAN, SH.

ttd.

PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, S.H.

Panitera-Pengganti,

ttd.

RAHMI MULYATI, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali .	Rp.	9.993.000,-
Jumlah	Rp.	<u>10.000.000,-</u>

PUTUSAN

Nomor : 010 K/N/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat Kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL, Berkedudukan di Wisma Danamon Aetna Life lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kay 4546 Jakarta 12930, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Irwan Rasjid, SH. dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor Irwan & Associates beralamat di Executive Golf mansion Kay. 20 Jl. Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2002, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Penjualan Barang untuk di jual;

m e l a w a n

TAFRIZAL HASAN GEWANG dalam hal ini bertindak selaku Kurator PT. GEMILANG. Advokat-Konsultan Hukum berkantor di Gedung Sentra Salemba Mas Blok U, Jalan Salemba Raya No. 34-36 Jakarta Pusat, Termohon Kasasi dahulu Kurator/Pemohon Penjualan Barang untuk di jual;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Pemohon Penjualan Barang telah mengajukan permohonan Penjualan Barang untuk dijual dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Pemohon adalah Kurator PT. GEMILANG yang diangkat berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 05/PKPU/2000/PN.Niaga .Jkt.Pst. jo. No: 17/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst., tanggal 13 Juli 2000 (Bukti P-1) dan semula permohonan a quo diajukan Re Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdaftar No. 372/Pdt.G/2001/PN.Niaga.Jkt.Sel. namun dalam putusannya tanggal 13 November 2001, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam

salah satu amar putusannya menyebutkan : “Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut” (Bukti P-2);

2. Bahwa karenanya memenuhi putusan tersebut, pemohon mengajukan permohonan kembali kepada Termohon dan ditujukan Re Pengadilan Niaga Jakarta Pusat guna memeriksa dan menyidangkan perkara a quo;
3. Bahwa dalam rapat-rapat para Kreditur PT. GEMILANG (Dalam Pailit) yang diadakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam rangka verifikasi / pencocokan piutang sesuai UUK, maka telah berhasil dibuat Daftar Piutang Para Kreditur PT. GEMILANG (Dalam Pailit) yang diakui tanggal 2 November 2000 yang ditandatangani oleh semua kreditur, termasuk Termohon dan Pemohon serta Hakim Pengawas, Bapak VICTOR HUTABARAT, SH. (Bukti P-3);
4. Bahwa sesuai surat Termohon kepada Kurator tanggal 12 Oktober 2000, maka Termohon menjelaskan bahwa piutangnya terhadap PT. GEMILANG (Dalam Pailit) dijamin dengan objek jaminan / hak tanggungan atas :
 - 4.1. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 3134 / Bangka seluas 1.797 M² atas nama HEDIYATI GUNADI BRATADIHARJA, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka dengan Sertifikat Hak Tanggungan masing-masing :
 - No. 4293/1996 tanggal 16 Oktober 1996 Jo. Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 400/Mp.Prap/1996 tanggal 27 September 1996 yang dibuat dihadapan Drs. HENSON, SH., selaku PPAT di Jakarta;
 - No. 815/1997 tanggal 3 April 1997 Jo. Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 7/Mp.Prap/1997 tanggal 24 Maret 1997 yang dibuat dihadapan IRAWATI MARZUKI ARIFIN, SH., selaku PPAT di Jakarta;
 - 4.2. 7 (tujuh) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat-sertifikat Hak milik :
 - No: 74/Jabon Mekar
 - No: 88/Jabon Mekar
 - No: 89/Jabon Mekar
 - No: 90/Jabon Mekar
 - No: 91/Jabon Mekar
 - No: 92/Jabon Mekar
 - No: 93/Jabon Mekar

tertulis atas nama LIMA UTOJO BUMILANG, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung, Kelurahan Jabon Mekar dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 359/1996 jo. Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 1876/72/Parung/1996 tanggal 28 Juni 1996 yang dibuat dihadapan Ny. AGUSTY RIDWAN, SH., selaku PPAT di Bogor;

- 4.3. 2 (dua) bidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Flak Milik No. 69/Bangka dan No : 1090/Bangka tertulis atas nama NY. LILIANA, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 789/1996 tanggal 25 Juni 1996 Jo. Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 218/Mp-Prapatan/1996 tanggal 4 Juni 1996 yang dibuat dihadapan MUHANI SALIM, SH., selaku PPAT di Jakarta (Bukti P-4);
5. Bahwa dengan selesainya pencocokan piutang dengan ditanda penandatanganan Daftar Piutang Para Kreditur PT. GEMILANG (Dalam Pailit) yang diakui (Vide Bukti P-3) maka sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUK, yang berbunyi :
“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56A, kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat (2) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1)”
Maka Termohon selaku Pemegang hak tanggungan, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan harus melaksanakan hak istimewanya tersebut;
6. Bahwa dalam pelaksanaannya, karena Termohon tidak menggunakan hak sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUK, maka Pemohon selaku Kurator demi hukum harus mengambil alih hak tersebut guna menjual barang jaminan tersebut diatas;
7. Bahwa nyatanya, Termohon dengan suratnya tertanggal 21 Mei 2001 dan 18 Juni 2001 (Bukti P-5) dan Bukti (P-6) yang ditujukan kepada Pemohon, jelas-jelas menolak pekerjaan Pemohon guna melakukan penjualan di muka umum atas barang-barang jaminan diatas, apalagi menyerahkan dokumen-dokumen asli yang dikaitkan dengan barang-barang jaminan tersebut;

PROVISI

8. Bahwa karena dalam kasus a quo, terjadi perbedaan-perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon mengenai Undang-Undang Kepailitan, khususnya mengenai ketentuan Pasal 57 ayat (2) UUK yang berbunyi :
“Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkan barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut”
maka dalam rangka penegakan dan tertib hukum, Pemohon mohon Majelis Hakim untuk mengeluarkan putusan provisional yang memerintahkan kepada Termohon untuk tidak melakukan eksekusi dan/atau penjualan maupun tindakan-

tindakan hukum lain yang bertujuan mengalihkan barang jaminan tersebut dalam angka 3 diatas;

Maka berdasarkan uraian diatas, kiranya Majelis Hakim sependapat dengan kami dan berkenan memberikan putusan-putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- “Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon”;
- “Menghukum Termohon untuk tidak melakukan eksekusi dan/atau penjualan maupun tindakan-tindakan hukum lain yang bertujuan mengalihkan barang-barang jaminan berupa :
 1. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No : 3134/Bangka seluas 1.797 M² atas nama HEDIYATI GUNADI BRATADIHARDJA, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka dengan Sertifikat Hak Tanggungan masing-masing :
 - No: 4293/1996 tanggal 16 Oktober 1996 Jo. Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 400/Mp.Prap/1996 tanggal 27 September 1996 yang dibuat dihadapan Drs. HENSON, SH., selaku PPAT di Jakarta;
 - No: 815/1997 Jo. Akte Pemberian Hak Tanggungan No: 7/Mp.Prap/1997 tanggal 24 Maret 1997 yang dibuat dihadapan IRAWATI MARZUKI ARIFIN, SH., selaku PPAT di Jakarta;
 2. 7 (tujuh) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat-sertifikat Hak Milik :
 - No: 74/Jabon Mekar
 - No: 88/Jabon Mekar
 - No: 89/Jabon Mekar
 - No: 90/Jabon Mekar
 - No: 91/Jabon Mekar
 - No: 92/Jabon Mekar
 - No: 93/Jabon Mekartertulis atas nama LIMA UTOJO GUMILANG, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung, Kelurahan Jabon Mekar dengan Sertifikat Hak Tanggungan No: 359/1996 Jo. Akte Pemberian Hak Tanggungan No: 1876/72/Parung/1996 tanggal 28 Juni 1996 yang dibuat dihadapan Ny. AGUSTY RIDMAN, SH., selaku PPAT di Bogor;
 3. 2 (dua) bidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No: 69/ Bangka dan No: 1090/Bangka tertulis atas nama NY. LILIANA, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan

Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka dengan Sertifikat Hak Tanggungan No: 789/1996 tanggal 25 Juni 1996 Jo. akte Pemberian Hak Tanggungan No: 218 / Mp-Prapatan/1996 tanggal 4 Juni 1996 yang dibuat dihadapan MUHANI SALIM, SH., selaku PPAT di Jakarta;

DALAM POKOK PERKARA

- “Mengabulkan seluruh permohonan pemohon”;
- “Menyatakan Termohon bersalah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan”;
- “Menghukum Termohon untuk menyerahkan barang agunan berikut bukti kepemilikannya, yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik No: 3134 /Bangka seluas 1.797 M² atas nama HEDIYATI GUNADI BRATADIHARDJA, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka;
 - Sertifikat Hak Milik No: 74 /Jabon Mekar, No: 88/Jabon Mekar, No. 89/ Jabon Mekar No. 90/Jabon Mekar, No: 91/Jabon Mekar, No. 92/Jabon Mekar, No: 93/Jabon Mekar, tertulis atas nama LIMA UTOJO BUMILANG, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung, Kelurahan Jabon Mekar;kepada Pemohon guna dilakukan penjualan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan”;
- “Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara”;
- “Dalam peradilan yang baik mohon putusan ex aequo et bono”;

Bahwa terhadap permohonan Penjualan Barang Untuk di jual tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PEMOHON TELAH PERNAH DIPERKARAKAN ATAU DIPUTUS OLEH PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT DAN PUTUSAN PERKARA A QUO TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (inkracht van gewijsde zaak):

1. Bahwa dalam perkara ini PEMOHON selaku Kurator PT. Gemilang (pailit) pernah atau mengajukan permasalahan yang sama berkaitan dengan asset atau harta kekayaan milik Para Penjamin dan Pihak Ketiga apakah masuk dalam boedel pailit atau diluar boedel pailit untuk diputuskan dalam sidang permusyawaratan hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara

No. 05/PKPU/2000.PN.NIAGA.JKT.PST Jo. No. 17/PAILIT/2000.
PN.NIAGA.JKT.PST.;

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara No. 05/
PKPU/2000. PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 20 Desember 2000 telah
memutuskan hal-hal sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Menyatakan benda yang dijaminkan Lima Utojo Gumulang sebagai
penjamin debitor pailit/PT. Gemilang dan Ny. Liliana sebagai pihak ketiga
tidak termasuk harta/boedel pailit PT. Gemilang. (Bukti T-1);

Berdasarkan isi putusan ini secara hukum kurator tidak berwenang
melakukan pengurusan atau pemberesan terhadap asset diluar boedel pailit
yang berada di BPPN. Dengan demikian terhadap asset-asset diluar boedel
pailit tidak tunduk pada ketentuan Undang-Undang kepailitan;

2. Selanjutnya atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat in casu perkara
No. 05/PKPU/2000 PN.Niaga Jkt.Pst jo. 17/Pailit/2000 PN. Niaga Jkt.Pst
PEMOHON mengajukan upaya Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juli
2001 dalam register perkara No. 016/PK/N/2001 telah memutuskan sebagai
berikut :

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dari Tafrizal Hasan
Gewang, SH selaku Kurator PT. Gemilang tersebut tidak dapat diterima
(Bukti T-2).

3. Bahwa atas putusan-putusan sebagaimana tersebut diatas in casu dalam
perkara Nomor : 05/PKPU/2000.PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 17/
PAILIT/2000.PN.NIAGA.JKT.PST. secara hukum atas obyek/barang
sengketa dalam perkara ini dinilai telah diputus baik ditingkat pertama
pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bukti T-1)
maupun ditingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik
Indonesia (Bukti T-2) dan atas putusan-putusan tersebut merupakan putusan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van
gewijsde), sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut secara hukum Pemohon
tidak berhak atau berwenang mengajukan kembali terhadap perkara yang
sama di tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, oleh karena itu atas
permohonan Pemohon dalam perkara ini dinilai merupakan perkara yang
telah "ne bis in idem";

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

4. Bahwa menunjuk ketentuan Pasal 280, Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Kepailitan dinyatakan :
 - (1). Permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Bab Pertama dan Bab Kedua, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada dilingkungan Peradilan Umum;
 - (2). Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memeriksa dan memutus permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 282 :

- (1). Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama dengan Hakim Majelis;
- (2). Dalam hal yang menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2), Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal;

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut diatas bahwa Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutuskan atas perkara-perkara sebagai berikut :

- a. Permohonan pernyataan Pailit;
- b. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- c. Perkara lain di bidang Perniagaan;

Sehubungan dengan permohonan Pemohon perihal penyerahan barang untuk dijual sesuai ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Kepailitan, Termohon menilai permohonan tersebut tidak termasuk dalam lingkup perkara di bidang Kepailitan sehingga demi hukum Pengadilan Niaga dinilai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh pemohon selaku Kurator PT. GEMTLANG (Pailit) dalam hal Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan perkara aquo Termohon dan menilai Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa atas permohonan ini, Pemohon dinilai telah mencampurkan pengertian antara permohonan dan gugatan atau tuntutan. Dimana pada halaman pertama Pemohon mengajukan atas perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon mengenai ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, sedangkan pada halaman 5 dalam pokok perkara menuntut :

- Menyatakan Termohon bersalah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan;
- Menghukum Termohon menyerahkan barang agunan berikut bukti kepemilikan;

Dalam perkara yang disebut permohonan secara hukum tidak ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Sebaliknya dalam perkara gugatan atau tuntutan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan atau diputus oleh Pengadilan atas segala kerancuan dalam permohonan ini dinilai tidak jelas dan kabur;

5. Bahwa Termohon sangat keberatan atas dalil-dalil dan Pemohon yang menyatakan dasar hukum diajukannya permohonan dalam perkara ini didasarkan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor : 372/Pdt.G/2001.PN.Jkt.Sel. tanggal 13 November 2001, yang salah satu amarnya menyebutkan :

“Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut” (Bukti P-2);

Bahwa atas adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor : 372/Pdt.G/2001.PN.Jkt.Sd., sebenarnya secara hukum Pemohon sudah tidak berwenang lagi mengajukan kembali segala tuntutan hukum berkaitan dengan perkara a quo terhadap Termohon, baik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan atas permasalahan dalam perkara ini telah ada putusan-putusan, khususnya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, perlu kiranya Majelis Hakim mencermati prinsip-prinsip dalam hukum acara yang berlaku secara umum dan khusus baik acara perdata maupun acara di bidang kepailitan.

Pengajuan atas permasalahan yang sama dengan membuat dalil-dalil yang mengada-ada justru menunjukkan bukti adanya itikad baik dan Pemohon, yang dipandang telah melakukan tindakan hukum atau upaya-upaya hukum

yang sangat bertentangan dengan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juli 2001 perkara Nomor : 016 PK/N/2001 dan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2000 perkara Nomor : 05/PKPU/2000 PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor : 17/Pailit/2000. PN. Niaga.Jkt.Pst. ; Secara hukum putusan-putusan tersebut dinilai telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Pemohon selaku Kurator tidak berwenang melakukan penuntutan atas harta (barang) di luar Boedel Pailit;

7. Menunjuk Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa : “Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit”. Dan ketentuan Pasal tersebut secara jelas dan tegas bahwa Kurator hanya berwenang melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta milik dan Debitur Pailit, diluar itu Kurator tidak berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena dalam perkara ini diketahui debitur pailit adalah : PT. GEMILANG, maka secara hukum Kurator hanya berwenang melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan milik PT. Gemilang selaku debitur pailit. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan serta adanya putusan-putusan sebagaimana Bukti T-1 dan Bukti T-2 menjadi dasar hukum dan Termohon untuk menilai Pemohon selaku Kurator PT. Gemilang (Pailit) tidak berwenang melakukan penuntutan atas harta/barang di luar boedel pailit;

bahwa terhadap permohonan Penyerahan Barang Untuk Dijual (PBUD) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 7 Maret 2002 Nomor: 05/PKPU/2000/PN. NIAGA. JKT.PST. jo. Nomor : 17/PAILIT/2000/PN.NIAGA. JKT. PST., dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dan Termohon;

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi dan Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

- Menyatakan Termohon tidak mempergunakan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;
 - Menghukum Termohon untuk menyerahkan barang agunan berikut bukti kepemilikannya berupa :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 3134/Bangka seluas 1.797 M² atas nama HEDIYATI GUNADI BRATADIHARDJA, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 74/Jabon Mekar, Nomor : 88/Jabon Mekar, Nomor : 89/Jabon Mekar, Nomor : 90/Jabon Mekar, Nomor : 91/Jabon Mekar, Nomor : 92 /Jabon Mekar, Nomor : 93/Jabon Mekar, tertulis atas nama LIMA UTOJO GUMILANG, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung, Kelurahan Jabon Mekar;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 69/Bangka dan Nomor : 1090/Bangka tertulis atas nama Ny. LILIANA, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka;
- kepada Pemohon guna dilakukan penjualan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tanpa mengurangi hak Termohon untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut;
- Membebankan Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Pemohon, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2002 diajukan permohonan Kasasi secara tertulis pada tanggal 19 Maret 2002 sebagaimana ternyata dan akte permohonan kasasi No. 05/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 17/Pailit/2000/PN.NIAGA.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Maret 2002 pada hari itu juga.

bahwa setelah itu oleh Termohon Penjualan Barang untuk di jual / Kurator telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dan Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Maret 2002;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diberitahukan pihak lawan dengan seksama;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi, dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI TERHADAP KETENTUAN PASAL 57 (1) DAN PASAL 57 AYAT (2) UU NO. 4 TAHUN 1988 TENTANG KEPAILITAN YANG KELIRU :

Pasal 57 ayat (1) :

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56 A, Kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1)”.

Pasal 57 ayat (2) :

“Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkan barang yang menjadi agunan yang selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 171, tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut”.

Bahwa sesuai dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 05/ PKPU / 2000 PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 17/Pailit/2000 PN. Niaga Jkt. Pst. tertanggal 20 Desember 2000 yang memutuskan bahwa :

“Menyatakan benda yang dijaminkan Lima Utojo Gumilang sebagai Penjamin Debitur Pailit / PT. GEMILANG dan Ny. Liliana sebagai Pihak Ketiga, tidak termasuk harta / boedel pailit PT. GEMILANG”.

Serta Putusan Peninjauan Kembali No: 016/PK/N/2001, yang Putusannya menyatakan :

“Bahwa Peninjauan Kembali dan TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH selaku Kurator PT. GEMILANG tersebut tidak dapat diterima”.

Sehingga jelaslah bahwa barang-barang jaminan berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No: 3134 / Bangka seluas 1.797 M² atas nama HEDIYATI GUNADI BRATADIHARDJA, terletak di DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka;
2. Sertifikat Hak Milik No: 74/Jabon Mekar, No.: 88/Jabon Mekar, No.: 89/ Jabon Mekar, No.: 90/Jabon Mekar, No.: 91/Jabon Mekar, No.: 92/ Jabon Mekar, tertulis atas nama LIMA UTOJO GUMILANG, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung, kelurahan Jabon Mekar;

3. Sertifikat Flak Milik No: 69/Bangka dan No: 1090 / Bangka tertulis atas nama NY. LILIANA, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka;

Adalah tidak termasuk harta/boedel pailit PT. GEMILANG (sesuai dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 05/PKPU/2000 PN.Niaga. Jkt. Pst. jo. No: 17/Pailit/2000 PN.Niaga Jkt.Pst).

Jadi pertimbangan *judex facti* terhadap ketentuan Pasal 57 ayat (2) UU No. 4 1998 tentang Kepailitan adalah keliru karena jelas dan tegas dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 05/PKPU/2000/PN. Niaga Jkt.Pst. jo. No: 17/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana benda yang dijaminakan Lima Utojo Gumilang tidak termasuk harta/boedel pailit PT. GEMILANG, sehingganya PEMOHON KASASI keberatan untuk menyerahkan barang agunan berikut bukti kepemilikannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dalam Perkara a quo.

II. JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN TENTANG MASALAH NE BIS IN IDEM :

1. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan tentang masalah *ne bis in idem* karena sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No:05/PKPU/2000/PN.Niaga Jkt. Pst. jo. No: 17/Pailit/2000 PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa benda yang dijaminakan Lima Utojo Gumilang sebagai Penjamin Debitur Pailit / PT. GEMILANG dan Ny. Liliana sebagai Pihak Ketiga, tidak termasuk harta / boedel pailit PT. GEMILANG, sehingganya berdasarkan isi putusan tersebut benda yang dijaminakan Lima Utojo Gumilang merupakan asset-asset diluar boedel pailit dan tidak tunduk pada ketentuan UU Kepailitan.
2. Tentang Putusan 016/PK/N/2001, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali dari Tafrizal Hasan Gwang, SH, selaku Kurator PT. GEMILANG tersebut tidak dapat diterima.
3. Bahwa jelaslah dalam putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentunya Pemohon tidak berhak atau berwenang mengajukan kembali terhadap perkara yang sama di tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena *Ne Bis In Idem*.

III. JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN TENTANG BATASAN KEWENANGAN KURATOR :

1. Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 05/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt. Pst jo. No. 17/Pailit/2000 PN. Jkt. pst. dimana dinyatakan bahwa benda yang dijaminkan Lima Utojo Gumilang sebagai penjamin Debitur Pailit / PT. Geniilang dan Ny. Liliana sebagai pihak ketiga, tidak termasuk harta / boedel pailit PT. Gemilang, adapun asset yang tidak termasuk harta / boedel pailit adalah :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 3134 / Bangka seluas 1.797 M² atas nama Hedyati Gunadi Bratadihardja, terletak di DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 74/Jabon Mekar, No. 88/Jabon Mekar, No. 89/Jabon Mekar, No. 90/Jabon Mekar, No. 91/Jabon Mekar, No. 92/Jabon Mekar, tertulis atas nama Lima Utojo Gumilang, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung, Kelurahan Jabon Mekar;
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 69 / Bangka dan No. 1090 / Bangka tertulis atas nama Ny. Liliana, terletak di DKI, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa : "Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit". Dan ketentuan Pasal tersebut secara jelas bahwa Kurator hanya berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta Pailit. Oleh karena dalam perkara ini diketahui Debitur pailit adalah PT. Gemilang maka secara hukum Kurator hanya berwenang melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan milik PT. Gemilang selaku debitur pailit. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 67 (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut jelaslah bahwa selaku Kurator PT. Gemilang (Pailit) tidak berwenang melakukan penuntutan atas harta / asset diluar boedel pailit.

Menimbang :

mengenai keberatan kasasi :

Sebelum mempertimbangkan alasan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi perlu dipertimbangkan lebih dahulu, apakah atas putusan a quo dapat diajukan upaya hukum kasasi pasal 8 Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998, dengan tegas mengatur bahwa upaya hukum Kasasi hanya berlaku bagi putusan pernyataan pailit.

Bahwa perkara a quo adalah merupakan putusan dalam rangka pemberesan harta pailit yang bersifat eksekutorial bukan putusan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pasal 8.

Dengan demikian putusan a quo tidak dapat diajukan kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kasasi dipihak yang dikalahkan, harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Kasasi dari : Badan Penyehatan Perbankan Nasional tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SENIN tanggal 22 April 2002 dengan H. SOEHARTO, S.H., Ketua Muda sebagai Ketua Sidang, H. ABDUL KADIR MAPPING, S.H., dan H. SOEKIRNO, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua sidang tersebut dengan dihadiri H. ABDUL KADIR MAPPING, S.H., dan H. SOEKIRNO, S.H., Hakim-Hakim Anggota serta NY. SUPRIATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota
ttd.
H. ABDUL KADIR MAPPING, SH.
ttd.
H. SOEKIRNO, SH.

K e t u a
ttd.
H. SOEHARTO, SH.

Panitera Pengganti.
ttd.
NY. SUPRIATI, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp.	4.993.000,-
	Jumlah Rp.	<u>5.000.000,-</u>

Keterangan :

Tidak dilampirkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Selatan